

**PERAN UNI AFRIKA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK  
DI KONGO**

Zulkarnain\*

*Abstract*

*The conflicts that happened in Congo had resulted sorrows for the people, including medical access, food, settlement that causes fears. Those fears had caused many of the Congo people to migrate to other countries to find for protection, so that it had caused a high percentage of migration. In order to solve the conflict in Congo that had resulted many losses of lives and also resulted many of the people to evacuate because of losing their homes, then African Union as a regional organization, also Congo as a member of African Union, needs to facilitate along with the other international organizations to hold the Pretoria Accord Agreement, between the Democratic Republic of Congo and Rwanda as a part of the peace treaty between the two countries, also including the ethnics from the two countries that had suffered arm conflicts, where in this treaty is a treaty of cease fire, to reduce and to stabilize security aspects in Congo.*

*Keywords : Conflicts, African Union, Congo.*

**Pendahuluan**

Berakhirnya Perang Dunia ke II, menyisakan konflik baru di tatanan perpolitikan internasional. Konflik yang berlangsung tidak lagi merupakan konflik negara-negara melainkan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara yang berbentuk konflik bersenjata, perang saudara, gerakan separatis, dan peperangan domestik lainnya.

Konflik-konflik tersebut merupakan suatu ancaman besar terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Perang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, karena bisa menyebar hingga jauh keluar perbatasan geografisnya sendiri. Peperangan telah lama terjadi di wilayah Afrika. Setelah negara-negara di Afrika lepas dari jajahan negara-negara Eropa, negara-negara di Afrika dipimpin para pemimpin yang diktator. Konflik di negara-negara Afrika sulit untuk dicarikan solusinya menuju suatu perdamaian. Negara-negara di Afrika

---

\* Dosen Tetap Jurusan Hubungan Internasional FISIP- Universitas Nasional

yang kental dengan konflik antara lain : Rwanda, Somalia, Nigeria, Sudan, Kenya, dan juga Kongo yang sudah menelan korban jiwa yang banyak dari orang dewasa sampai anak-anak. Kondisi ini menunjukkan konflik internal yang terjadi di negara-negara Afrika banyak ditemukannya pelanggaran HAM.

Konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo merupakan perang saudara sejak tahun 1998 yang menghancurkan seluruh wilayah tersebut dan negara-negara di sekitarnya, dan telah menghancurkan infrastruktur dan perekonomian negara tersebut.

Konflik yang menghiasi konflik internal di negara Kongo adalah konflik etnis yaitu konflik antara agrikulturalis Lendu dengan peternak Hema di wilayah timur laut Kongo. Pertempuran bersenjata dimulai tahun 1996, peristiwa ini juga menyulut konflik Kivu. Konflik Kivu adalah konflik bersenjata antara militer Kongo melawan pasukan pemberontak dibawah Komando Laurent Nkunda. Konflik ini juga melibatkan *United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo*. ([www.bbc.uk](http://www.bbc.uk), 22 April 2011).

Konflik di Kongo telah menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk, termasuk akses kesehatan, makanan, tempat tinggal sehingga menyebabkan ketakutan. Ketakutan tersebut menimbulkan eksodus warga Kongo ke negara lain untuk mencari perlindungan, sehingga terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran. Dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Kongo yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan juga mengakibatkan banyaknya penduduk yang harus mengungsi karena telah kehilangan rumah mereka maka, Uni Afrika sebagai sebuah organisasi regional serta Kongo sebagai anggota dari Uni Afrika, dirasa perlu untuk turut campur dalam menanggulangi konflik di Kongo.

Kegagalan masyarakat internasional untuk campur tangan terhadap masalah ini dan terutama kegagalan untuk mencegah genosida di Rwanda membuat keinginan untuk memperkuat organisasi kawasan Afrika sebagai wadah untuk mencari solusi bagi masalah-masalah terutama masalah konflik yang terjadi di Afrika.

Pada tahun 1999 di Sierte, Libya OAU berubah menjadi African Union atau Uni Afrika (UA). Selain untuk mengedepankan kerjasama dalam bidang keamanan, Uni Afrika pun mempunyai misi untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik dan juga keterbukaan dalam bidang politik. Undang-Undang dari Uni Afrika kemudian ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2000 dengan peresmian organisasi yang terjadi pada bulan Juli 2002. Semua negara-negara Afrika menghadiri peresmian tersebut kecuali Maroko

karena menentang keanggotaan dari Sahara Barat. Dengan kelahiran Uni Afrika ini diharapkan Uni Afrika dapat menjadi aktor perdamaian dan keamanan di wilayah Afrika. (<http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm>. 23 April 2011). Organization African Union (OAU) atau Organisasi Kesatuan Afrika merupakan sebuah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1963. Dalam piagamnya dijelaskan bahwa perdamaian dan keamanan harus dibentuk dan dipelihara di wilayah Afrika. Pada awal tahun 1990 beberapa konflik baru muncul di Afrika.

Hal ini sangat menyita perhatian dunia internasional yang khawatir akan konflik internal yang berkepanjangan akan dapat mempengaruhi stabilitas negara dan juga negara-negara di kawasan benua Afrika, tidak hanya itu terkait dengan kasus diatas sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Konflik yang dimulai pada tahun 1996 tersebut membawa kekhawatiran yang sangat besar karena terjadinya konflik internal yang berkepanjangan sehingga membuat negara-negara internasional turun tangan untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut dan tidak hanya itu organisasi regional Afrika dalam hal ini Uni Afrika juga turut membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di negara Republik Demokratik Kongo tersebut. Karena konflik yang terjadi di Kongo kemudian menjadi luas hingga melibatkan negara Rwanda dan militernya.

Hingga pada tahun 2002, Uni Afrika bersama juga dengan organisasi-organisasi internasional lainnya untuk mengukung Pretoria Accord Agreement, antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda sebagai bagian dari perjanjian damai antara kedua nya juga melibatkan etnis-etnis dari kedua negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, dimana perjanjian ini adalah perjanjian gencatan senjata, untuk meminimalisir dan menstabilkan aspek keamanan di negara Kongo. (<http://www.newrwanda.org/index.php?midDRC.html>, 25 April 2011). Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi masalah pokok dari tulisan ini, yaitu bagaimanakah sebenarnya Peran Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik di Kongo Tahun 2002.

### **Landasan Konsep**

Dalam sebuah studi kasus yang dikemukakan oleh Gerhardus Stephanus Swart dalam *the Role of Preventive Diplomacy in African Conflicts : A Case Study of the Democratic Republic of The Congo : 1998-2004* diterangkannya bahwa sejak jaman dahulu wilayah Kongo banyak dihuni oleh kelompok separatis dan pemberontak, hal ini tercipta akibat pemerintahan dari negara Kongo itu sendiri yang selalu mengalami perguncangan politik akibat banyaknya kepentingan

sehingga kepentingan rakyat menjadi terhambat, sehingga timbulnya berbagai macam permasalahan seperti kemiskinan, ancaman keamanan, kesehatan, pendidikan dan juga pemberontakan yang terjadi dimana-mana.

Berdasarkan hal tersebut akhirnya sebagian wilayah perbatasan Kongo dijadikan tempat persembunyian bagi kelompok-kelompok pemberontak dari negara-negara Afrika lain seperti Rwanda. Sehingga memicu negara-negara tetangga Kongo yang secara otomatis akhirnya melakukan penyerangan terhadap wilayah Kongo yang juga kemudian dapat disebut sebagai perang antar negara. Karena juga sebagian besar negara-negara tetangga menganggap bahwa pemerintah Kongo turut melindungi kelompok-kelompok pemberontak dari negara lain yang bersembunyi di negaranya, dimana hal ini terlihat dari pasifnya pemerintah Kongo yang tidak bereaksi sedikitpun menanggapi wilayah perbatasannya dijadikan tempat persembunyian oleh kelompok-kelompok pemberontak dari negara lain. Hal inilah yang kemudian akhirnya memicu terjadinya konflik internal dan juga perang antar negara dari perang Kongo I hingga perang Kongo II.

Menurut Van Nieuwkerk dalam *“The Role of The AU and NEPAD in Africa’s New Security Regime in Peace in Africa : Towards a Collaborative Security Regime”*, dikatakan bahwa mayoritas negara-negara yang berada di benua Afrika merupakan negara-negara yang mayoritas di landa oleh isu keamanan yaitu konflik internal yang terjadi antara beberapa suku bangsa yang didasari karena perbedaan adat dan kebiasaan serta persaingan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa, serta juga hal ini dijadikan salah satu alat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat suatu isu keamanan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan. Dimana salah satunya adalah negara Kongo yang beberapa kali mengalami pergantian pemerintahan karena isu-isu keamanan yang tidak mampu diselesaikan sehingga beberapa kali mengalami transisi pemerintahan, dan hingga kinipun isu keamanan menjadi salah satu isu yang dominan dalam negara tersebut.

Sebagai aktor dalam hubungan internasional, organisasi internasional dianggap memberi keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk memberikan makna dari kerjasama yang dilakukan antara negara-negara dalam satu area dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara tersebut.

Dalam hal ini organisasi internasional yang berperan dalam membantu menangani masalah yang terjadi di Kongo adalah Uni Afrika yang merupakan

sebuah bentuk dari organisasi regional di Afrika. Sebagai sebuah organisasi dengan tujuan menciptakan perdamaian di wilayah Afrika maka Uni Afrika mengupayakan perjanjian Pretoria Accord sebagai sebuah bentuk dari kerjasama internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Kongo, sebagai sebuah non state aktor Uni Afrika dapat mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh terhadap suatu negara.

Adanya organisasi internasional merupakan suatu cerminan bahwa manusia hidup secara sosial dimana antar individu yang satu dengan individu yang lain saling membutuhkan, begitu juga dengan sebuah negara karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, negara tersebut pasti membutuhkan negara lainnya. Karena itu diciptakan suatu organisasi internasional yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Organisasi dan kerja sama internasional menjadi pilar penting dalam dinamika hubungan internasional, termasuk dalam upaya penyelesaian konflik. Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.

Oleh karena itu suatu negara perlu melakukan kerjasama yang dalam hal ini kerjasama internasional dengan negara lain ataupun organisasi internasional untuk mencapai kepentingannya. Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena National Understanding dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama; keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik” (Koesnadi Kartasasmita; 1998 : 20).

Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Banyu Perwita; 2005; 34).

Terdapat asumsi yang mengatakan bahwa pelaksanaan politik luar negeri suatu negara tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri.

Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara merupakan keharusan bagi negara tersebut. Hal itu mengingat terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan agar negara tersebut tidak tersisihkan dari pergaulan internasional.

Begitu pula yang terjadi pada negara Somalia. Sebagai sebuah negara yang mempunyai keterbatasan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu menghentikan konflik yang terjadi di negara tersebut Somalia tentu membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Maka dari itu Uni Afrika membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Kongo dengan melahirkan sebuah perjanjian Pretoria Accord. Pretoria Accord sendiri dapat digolongkan ke dalam bentuk dari perwujudan sebuah kerjasama internasional dalam menangani konflik yang terjadi di Kongo.

Di dalam membahas interaksi negara-negara terdapat tipe-tipe hubungan yang ada dan berlangsung di antara negara-negara. Terdapat dua tipe hubungan yang ekstrim yaitu konflik dan kerjasama (Soeprapto; 1997; 161). Konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan timbul oleh perpaduan dari berbagai sebab seperti tuntutan atas suatu masalah, sikap bermusuhan, dan berbagai jenis tindakan militer serta diplomatik tertentu. Perilaku yang tercermin pada tuntutan, sikap, dan tindakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan wilayah, untuk memperoleh akses ke daerah pemasaran, prestise, penggulingan pemerintahan suatu negara, dan lain sebagainya.

Konflik mencakup bermacam-macam tindakan seperti tindakan diplomatik, propaganda, ancaman, dan sanksi militer, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh salah satu negara terhadap negara lainnya. Berbagai macam tindakan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang menjadi sumber pertikaian datangnya bisa dari berbagai arah seperti : (1) permasalahan yang timbul karena pertentangan tujuan, (2) sikap para pengambil kebijakan yang cenderung mendorong untuk melakukan ancaman sanksi, dan (3) perilaku konflik.

Setelah berakhirnya Perang Dingin konflik yang mengemuka tidak lagi merupakan konflik antar negara tetapi yang banyak terjadi adalah konflik internal negara baik itu dalam bentuk konflik bersenjata, pemberontakan senjata, gerakan separatis, dan lain sebagainya. Dalam buku yang berjudul Demokrasi dan Konflik

yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, Peter Harris dan Ben Reilly mengatakan bahwa :

“Setiap konflik bersenjata yang besar berasal dari level domestik dalam negara dan bukan antar negara. Dua elemen kuat seringkali bergabung dalam konflik seperti ini. Yang pertama adalah identitas: mobilisasi orang-orang dalam kelompok-kelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa, dan seterusnya. Yang kedua adalah distribusi: cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (di mana, misalnya, suatu kelompok agama kekurangan sumber daya tertentu yang didapat kelompok lain), kita menemukan potensi konflik (Ben Reilly; 2000; 11).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan identitas tersebut bisa disebabkan karena konflik atas pendistribusian sumber daya seperti wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja. Konflik tersebut adalah merupakan ancaman besar terhadap stabilitas dan perdamaian suatu negara.

Konflik merupakan suatu aksi fisik dan non fisik antara dua kelompok atau lebih untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara tradisional dimaknai sebagai pertikaian bersenjata, di era modern, perang lebih mengarah pada kekuatan teknologi dan industri, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan harus dicapai oleh teknologi.

Konflik yang terjadi di Kongo merupakan konflik bersenjata. Terdapat ciri-ciri dari konflik bersenjata menurut Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa yaitu antara lain :

- Bahwa konflik bersenjata melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka konflik bersenjata dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara.
- Konflik bersenjata mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksifikasi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Pada Pasal 1 ayat (2). “Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan

merupakan konflik bersenjata([http://pdfcontact.com/ebook/konvensi\\_jenewa.html](http://pdfcontact.com/ebook/konvensi_jenewa.html), 25 April 2011).

Pada awalnya, ICRC mengajukan suatu definisi yang luas mengenai kriteria substansi yang dimaksud dengan konflik bersenjata yaitu adanya suatu konfrontasi antara angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, yang mana kelompok tersebut harus memiliki dengan derajat minimum sebagai suatu organisasi.

Konflik bersenjata adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya, berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam, seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut (<http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract.html> , 22 April 2011).

Dengan adanya konflik yang terjadi di Kongo, maka Uni Afrika sebagai organisasi regional di kawasan Afrika dalam upaya menangani masalah konflik yang terjadi di Kongo mengusung sebuah perjanjian perdamaian Pretoria Accord yang dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi kemanusiaan. Intervensi yang menitikberatkan pada negara sebagai target berkaitan dengan kewajiban moral dikenal sebagai intervensi yang didasarkan pada asas kemanusiaan. Berdasarkan tujuan yang ada, seringkali suatu negara melakukan intervensi yang didasarkan atas asas kemanusiaan atau biasa disebut sebagai Intervensi Kemanusiaan/Humanitarian Intervention ([www.african-internal-conflict.com](http://www.african-internal-conflict.com) , 22 September 2011).

Intervensi sendiri merupakan suatu prosedur tingkat tinggi dan ringkas yang terkadang berada di luar jangkauan hukum. Intervensi harus terbebas dari sifat keinginan untuk mencapai kepentingan nasional dari negara yang melakukan intervensi, dan aspek kemanusiaan harus menjadi tujuan utama (Chesterman; 2001; 42).

Menurut Adam Roberts dalam bukunya yang berjudul *Humanitarian War: Military Intervention & Human Right International Affairs* memberikan definisi intervensi kemanusiaan sebagai berikut, Intervensi kemanusiaan merupakan intervensi militer yang dilakukan di negara lain dengan kesepakatan yang bersifat terbatas ataupun tanpa kesepakatan sama sekali antara pihak yang melakukan intervensi dengan penguasa setempat, untuk mencegah terjadinya kesengsaraan & korban jiwa lebih lanjut ([www.peace & war.com](http://www.peace&war.com) diakses tgl 25 September 2011).

Kongo yang tergolong merupakan negara miskin dan dilanda banyak isu, seperti kasus yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah isu keamanan yakni terjadinya konflik antar suku yang eskalasi konfliknya meningkat menjadi konflik antar negara yang pada kenyataannya tidak mampu diselesaikan oleh aparat hukum maupun pemerintah Kongo sehingga pada akhirnya melibatkan pihak-pihak di luar negara Kongo yakni salah satunya adalah Organisasi Regional Afrika yaitu Uni Afrika yang membantu menengahi konflik yang terjadi dan merangkul pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan gencatan senjata.

### **Sejarah Konflik di Republik Demokratik Kongo**

Perang saudara berlangsung berkepanjangan di RDK sejak 1998 yang menghancurkan serta menyeret seluruh wilayah tersebut dan negara-negara di sekitarnya. Aksi kekerasan tersebut telah menghancurkan infrastruktur dan perekonomian Negara. Perang saudara di RDK secara resmi berakhir tahun 2003. Tetapi pemberontak di sebelah timur negara Afrika itu masih memerangi pasukan pemerintah dan pasukan perdamaian PBB serta membuat takut dan cemas para pengungsi warga sipil yang menjadi korban dalam perang ini. Tidak hanya perang saudara saja yang terjadi tetapi dari perang saudara tersebut menimbulkan konflik-konflik baru. Selain kebencian etnis, konflik di RDK juga tidak lepas dari perebutan kekuasaan atas sumber daya. Sebuah investigasi PBB soal eksploitasi sumber daya alam ilegal di RDK menemukan bahwa konflik di negara itu terutama soal akses dan kontrol atas berlian, tembaga, kobalt, dan emas. Konflik-konflik yang terjadi di RDK adalah sebagai berikut (Swart; 2004; 87).

#### **1. Kelompok-Kelompok Pemberontak di Republik Demokratik Kongo**

Jean-Pierre Bemba adalah mantan pemberontak yang kemudian menjadi menteri keuangan dan dituduh melakukan kejahatan. Bemba telah melancarkan perang sengit tujuh tahun sejak 1998. Pada puncaknya, konflik di bekas negara Zaire itu, telah menyeret setidaknya tujuh kekuatan militer asing dan, meskipun

ada serangkaian kesepakatan perdamaian dan proses peralihan berjalan sejak 2003, pergolakan etnik dan penjarahan terus terjadi bagian timur negeri tersebut (Reed; 2004; 22).

Calon lain meliputi keturunan tokoh kenamaan di negara bekas koloni Belgia itu, termasuk putra diktator lama Mobutu Sese Seko dan pahlawan kemerdekaan yang terbunuh Patrice Lumumba. Lumumba menang dalam pemilihan demokratis terakhir di negeri tersebut pada malam menjelang kemerdekaan 1960, tapi ia diberhentikan jabatannya oleh Mobutu yang membuat negara itu identik dengan korupsi pada 1997.

Perang Kongo I adalah konflik yang terjadi antara akhir 1996 sampai 1997 dimana presiden Zaire, Mobutu Sese Seko digulirkan oleh pasukan pemberontak yang di dukung oleh kekuatan asing seperti negara Uganda dan Rwanda. Pemimpin pemberontak Laurent-Desire Kabila menyatakan dirinya presiden dan mengganti nama negara kembali dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Dalam perang ini pihak yang terlibat adalah AFDL, Rwanda, dan Zaire. Perang Kongo pertama ini kemudian berlanjut ke Perang Kongo II yang melibatkan lebih banyak negara, yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 1998.

Konflik Ituri adalah konflik antara agrikulturalis Lendu dan peternak Hema di wilayah Ituri sebelah timur laut Republik Demokratik Kongo. Pertempuran bersenjata dimulai tahun 1996 dan masih berlanjut sampai sekarang. Lebih dari 50.000 orang tewas dalam konflik ini. Konflik ini merupakan bagian dari Perang Kongo Kedua, juga disebut Perang Dunia di Afrika dan Perang Besar Afrika, terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2003 di Republik Demokratik Kongo (sebelumnya disebut Zaire). Perang ini merupakan perang terbesar dalam sejarah Afrika modern. Perang ini secara langsung melibatkan delapan negara Afrika, dan 25 grup bersenjata. Perang ini dilaporkan telah membunuh 5.4 juta penduduk, kebanyakan akibat kelaparan dan penyakit, menjadikan Kongo sebagai tempat konflik paling mematikan setelah Perang Dunia II. Konflik ini pun berlanjut dengan konflik Kivu.

Konflik Kivu adalah konflik bersenjata antara militer Republik Demokratik Kongo melawan pasukan pemberontak dibawah komando Laurent Nkunda, terjadi di Republik Demokratik Kongo. Konflik ini juga melibatkan *United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo*. Konflik ini terjadi pada tahun 2004 sampai sekarang. Pihak-pihak yang terlibat adalah Republik Demokratik Kongo dengan FDLR, CNDP (pemberontak) yang dipimpin oleh Laurent Nkunda. (Swart; 2004; 78).

Sehingga dapat dilihat diatas bahwa beberapa konflik yang terjadi di Kongo ditimbulkan oleh adanya konflik suku dan ras sehingga menyebabkan timbulnya konflik internal yang sangat besar dan sulit untuk diredam karena hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi atau semacam perang adat, yang jika tidak dihentikan maka perang tersebut akan berlangsung secara turun temurun.

## **2. Perang Kongo**

Perang di Kongo terbagi menjadi dua yakni perang Kongo I dan Perang Kongo II. Perang Kongo I dimulai ketika Tanggal 4 Oktober 1996, kelompok pemberontak dari etnis Banyamulenge-etnis lokal yang masih memiliki hubungan dekat dengan etnis Tutsi - melakukan serangan ke desa Lamera, Zaire timur. Pemerintah pusat Zaire yang merasa terkejut dengan serangan tersebut kemudian menyatakan bahwa mereka akan mendeportasi etnis Banyamulenge keluar dari wilayah Zaire secara besar-besaran. Lebih lanjut, pemerintah Zaire menambahkan bahwa etnis Banyamulenge yang tidak meninggalkan Zaire dalam waktu 2 minggu akan dieksekusi di tempat. Keputusan pemerintah tersebut ternyata menjadi blunder karena semakin memperkeruh keadaan & meningkatkan tensi pemberontakan.

Awal Oktober 1996, kelompok gabungan pemberontak anti-Mobutu & tentara nasional Rwanda melakukan serangan ke wilayah Zaire timur melalui Burundi. Hanya dalam waktu relatif singkat, kota-kota penting di kawasan itu seperti Uvira & Bukavu berhasil mereka kuasai. Pasukan gabungan tersebut kemudian melaju lebih jauh & menyerang kota penting lainnya, Goma, dari arah selatan & timur sekaligus. Pasukan Zaire yang ditempatkan di kawasan tersebut akhirnya dipaksa mundur pada awal November. Pemerintah Zaire lantas meresponnya dengan mengirim pasukan yang dilengkapi dengan senjata berat ke wilayah Zaire timur, namun nyatanya keberadaan mereka di sana malah memperburuk keadaan. Sebabnya adalah karena mereka yang dikirim ke sana tidak bisa membedakan penduduk lokal dengan anggota pemberontak, mereka kerap melakukan pendobrakan paksa & perampasan di rumah-rumah penduduk setempat.

Melihat kondisi Zaire Timur yang semakin memburuk & bisa mengancam nyawa pengungsi-pengungsi Hutu di sana, PBB menyusun rencana untuk segera mengirim pasukan multinasional. Mendengar berita tersebut, pasukan AFDL lantas melakukan serangan kilat ke kompleks pengungsi Hutu di Kimbumba dengan tujuan mengarahkan para pengungsi untuk kembali ke Rwanda tanpa

melukai mereka & mencegah campur tangan asing. Pasukan Zaire & milisi Hutu yang menjaga kompleks pengungsian tersebut berusaha melawan sekuat tenaga, namun mereka gagal mencegah para pengungsi melarikan diri ke arah Rwanda & sekitarnya. Hilangnya kompleks pengungsian tersebut karena para pengungsinya pergi melarikan diri pada gilirannya menyebabkan PBB mengurungkan niatnya untuk mengirim pasukan multinasional. Di lain pihak, banyak dari anggota milisi Hutu yang melarikan diri ke wilayah Zaire barat.

Dalam perang merebut wilayah timur Zaire, negara-negara seperti Angola, Burundi, & Uganda mulai melibatkan diri. Angola yang memiliki pemerintahan berhaluan komunis ingin menumbangkan rezim Mobutu yang menyokong kelompok pemberontak anti-komunis di negaranya. Burundi yang letaknya bersebelahan dengan Rwanda memang memiliki pemerintahan yang didominasi oleh etnis Tutsi. Dan Uganda? Mereka melakukan itu sebagai semacam bentuk balas budi di mana ketika terjadi perang sipil di Uganda pada dekade 1980-an, banyak dari anggota perantauan Tutsi di Uganda yang membantu pasukan pimpinan Yoweri Museveni untuk menggulingkan rezim berkuasa di Uganda saat itu. Sebagai konsekuensinya, Zaire pun kini harus bertempur melawan 4 negara sekaligus : Angola, Burundi, Rwanda, & Uganda.

Kembali ke medan perang. Selama pertempuran di wilayah Zaire timur, pasukan Zaire terbukti tidak bertaji karena rendahnya rasa disiplin & keahlian mereka dalam berperang. Sebagai contoh, pasukan Zaire begitu mudah kehilangan persenjataan berat semisal artileri & tank sejak awal pertempuran. Mereka juga mudah panik & seringkali langsung mundur tanpa perlawanan berarti ketika pasukan lawan mendekat. Selain itu, ketika bergerak mundur pasukan Zaire sering melakukan aksi-aksi perampasan kepada penduduk lokal Zaire di rute yang mereka lewati. Akibatnya sudah jelas, penduduk lokal Zaire semakin kehilangan simpati terhadap tentara negara mereka sendiri. Sadar bahwa tentara nasionalnya tidak bisa diandalkan, pemerintah Zaire terpaksa memakai milisi Hutu dari Rwanda, milisi anti-komunis Angola, & tentara-tentara bayaran untuk membantu menahan laju pasukan gabungan anti-Mobutu.

Habisnya kesabaran penduduk lokal terhadap tindakan-tindakan tentara Zaire akhirnya berbuntut pada pertempuran di kota penting Kisangani pada bulan Maret 1997. Saat itu, penduduk lokal memandu kelompok pemberontak ke lokasi-lokasi strategis di sekitar kantong pertahanan milik pasukan Zaire & milisi Hutu. Pasukan gabungan anti-Mobutu tersebut kemudian mengepung kantong pertahanan tersebut dari 3 arah sekaligus. Hanya dalam waktu 2 hari, kota

Kisangani akhirnya berhasil dikuasai oleh pasukan anti-Mobutu. Pasukan Zaire sendiri sempat mengirimkan pesawat tempur untuk menggempur pasukan anti-Mobutu. Namun usai pertempuran di Kisangani, pesawat tempur milik Zaire tidak pernah terlihat digunakan lagi.

Jatuhnya Kisangani ke tangan pasukan anti-Mobutu sekaligus meruntuhkan reputasi Mobutu karena pertempuran di Kisangani menunjukkan bagaimana opini masyarakat Zaire terhadap rezim Mobutu. Perlahan tapi pasti, pasukan gabungan anti-Mobutu pun mulai bergerak ke arah ibukota Zaire, Kinshasa, & merebut kota-kota di rute yang mereka lewati. Namun, pergerakan pasukan gabungan anti-Mobutu tersebut sempat tertahan ketika mereka mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan gabungan Zaire & milisi anti-komunis Angola di kota Kenge yang hanya berjarak 120 mil dari Kinshasa. Selama perang ini, pasukan anti-Mobutu sempat dipaksa mundur kembali ke Zaire timur sebelum akhirnya berhasil memukul balik pasukan pro-Mobutu. Korban jiwa yang timbul akibat pertempuran di Kenge mencapai 300 orang lebih & menjadikan pertempuran tersebut sebagai salah satu peristiwa pertempuran paling berdarah selama Perang Kongo Pertama.

Pasukan anti-Mobutu akhirnya tiba di tepi Kinshasa. Pembicaraan damai sempat dilakukan untuk mencegah konflik meletus, namun gagal setelah perwakilan yang dikirim oleh kelompok anti-Mobutu ditembak oleh seorang pendukung Mobutu. Pasukan anti-Mobutu akhirnya membanjiri kota Kinshasa, namun tidak timbul pertumpahan darah karena pasukan Zaire sudah diinstruksikan sebelumnya untuk bekerja sama dengan pasukan anti-Mobutu bila situasi sudah tidak mendukung. Perang Kongo Pertama pun secara resmi berakhir pada bulan Mei 1997 dengan kemenangan pasukan anti-Mobutu. Mobutu sendiri berhasil melarikan diri tepat sebelum pasukan gabungan yang menentangnya menduduki kota Kinshasa. Ia tidak pernah kembali lagi ke Zaire hingga akhirnya meninggal pada tanggal 7 September 1997 di kota Rabat, Maroko.

Tidak lama setelah tumbanganya rezim Mobutu, Laurent-Desire Kabila yang merupakan pemimpin kelompok AFDL, kelompok pemberontak utama yang menggulingkan rezim Mobutu - naik menjadi presiden Zaire. Berbagai perubahan pun ia lakukan, salah satunya adalah mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo (RDK). Di lain pihak, Rwanda & Uganda yang membantu pasukan AFDL menumbangkan rezim Mobutu tetap menempatkan pasukannya di wilayah RDK.

Seiring berjalannya waktu, relasi antara Kabila dengan Rwanda & Uganda mulai merengang setelah Kabila melihat bahwa Rwanda & Uganda mengeksploitasi

mineral yang ada di wilayah timur RDK untuk kepentingan mereka sendiri. Dari kubu RDK sendiri, rakyat RDK melihat Kabila tidak lebih sebagai boneka asing karena ia menjadi pemimpin RDK berkat bantuan negara-negara asing dalam menumbangkan Mobutu. Maka Kabila pun melakukan sejumlah langkah berani seperti mengganti sejumlah staf kepercayaannya yang berasal dari Rwanda dengan staf dari etnis Kongo & menyuruh staf-staf dari Rwanda tersebut untuk kembali ke negara asal mereka.

Langkah yang dilakukan Kabila tidak sampai di situ. Lebih lanjut, ia memerintahkan pasukan Rwanda & Uganda untuk segera angkat kaki dari negaranya. Perintah Kabila tersebut mengejutkan Rwanda & Uganda yang melihat Kabila mulai berani berseberangan dengan mereka. Di tempat lain, etnis Banyamulenge yang bermukim di wilayah timur RDK & memiliki kedekatan dengan etnis Tutsi juga mulai gelisah dengan kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan Kabila tersebut karena mereka sejak lama memang memiliki hubungan yang kurang baik dengan etnis-etnis lain di sekitar mereka. Pihak Rwanda & Uganda lantas mulai memanfaatkan kegelisahan komunitas etnis Banyamulenge untuk memicu pemberontakan.

Tanggal 2 Agustus 1998, komunitas Banyamulenge membentuk kelompok pemberontak anti-Kabila yang bernama (*Rassemblement Congolais pour la Democratie* atau disingkat RCD yang merupakan kelompok pemberontak yang menginginkan terjadinya kemajuan bagi Republik Kongo yang melakukan pemberontakan di kota Goma, RDK timur. Dalam aksi pemberontakan tersebut, pemerintah Rwanda & Uganda juga mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan RCD. Pasukan gabungan baru yang anti Kabila tersebut dalam waktu relatif singkat berhasil merebut kota-kota penting di RDK timur seperti Bukavu & Uvira (Prendergast; 2006; 208).

Kabila yang terkejut akan aksi pemberontakan tersebut lalu membentuk kelompok milisi baru bernama Mai-Mai & meminta bantuan milisi-milisi etnis Hutu yang masih bermukim di RDK untuk membantunya. Lebih lanjut, melalui stasiun radio di Bunia, RDK timur, Kabila menyuruh penduduk setempat mempersenjatai diri mereka dengan semua benda tajam yang mereka miliki untuk membunuh etnis Tutsi Rwanda. Paul Kagame selaku pemimpin Rwanda lantas meresponnya dengan menyatakan bahwa Kabila berencana melakukan genosida terhadap etnis Tutsi sambil menyatakan bahwa wilayah timur RDK secara historis merupakan bagian dari wilayah Rwanda.

Alur perang yang terjadi kembali meniru alur Perang Kongo Pertama. Pasukan gabungan anti-pemerintah RDK bergerak perlahan tapi pasti ke arah Kinshasa, sementara pasukan RDK berusaha menghentikan pergerakan mereka dengan susah payah. Namun bedanya, jika di Perang Kongo Pertama penduduk lokal membantu pasukan anti-pemerintah, kali ini mereka saling membantu untuk menahan laju pasukan anti-pemerintah. Dalam periode yang kurang lebih bersamaan, Uganda juga membentuk kelompok milisi baru bernama *Mouvement pour la Liberation du Congo* (MLC; Gerakan Pembebasan Kongo). (Cliffers; 2001; 21).

Situasi perang yang semakin runyam membuat Kabila pergi keluar RDK untuk meminta bantuan negara-negara asing. Diplomasinya membuahkan hasil di mana 4 negara Afrika setuju untuk mengirimkan pasukan bantuan ke RDK : Angola, Chad, Namibia, & Zimbabwe. Selain keempat negara tersebut, Libya juga membantu menyediakan pesawat untuk mengangkut pasukan dari negara Afrika lain ke RDK. Sudan juga menyatakan dukungannya kepada RDK, namun dukungan yang mereka berikan berupa bantuan kepada kelompok-kelompok milisi anti-pemerintah di Uganda. Di luar Afrika, negara-negara seperti AS & Jepang juga memberikan dukungan kepada Kabila untuk mempertahankan pemerintahannya, namun enggan mengirimkan bantuan pasukan ke sana. (ICG; 1999; 31).

Kedatangan pasukan multinasional Afrika ke RDK pun memulai babak baru dimulainya "perang dunia versi Afrika". Pasukan gabungan RDK, Angola, Chad, Namibia, & Zimbabwe bertempur melawan pasukan gabungan Rwanda, Uganda, & Burundi. Alur perang pun mulai berubah di mana pasukan anti-Kabila yang semula bisa bergerak perlahan tapi pasti ke arah Kinshasa dipaksa untuk mundur kembali ke wilayah timur RDK. Meskipun berhasil mencegah pasukan anti-Kabila menguasai Kinshasa, pasukan gabungan pro Kabila sendiri gagal menenyahkan pasukan anti-Kabila yang menguasai wilayah timur RDK.

Masuknya negara-negara Afrika lain ke medan perang RDK erat kaitannya dengan kepentingan masing-masing negara di RDK. Namibia & Uganda memiliki motivasi yang kurang lebih serupa : mengamankan lahan kaya mineral & logam mulia di wilayah RDK. Chad menerjunkan pasukan atas tekanan Perancis - mantan penjajah Chad - karena RDK adalah salah satu negara berbahasa Perancis terbesar di dunia, namun Chad juga menjadi negara pertama yang mundur dari medan perang karena aksi-aksi kejahatan kemanusiaan & perampasan yang dilakukan oleh tentaranya sehingga memicu kecaman internasional.

Tanggal 16 Januari 2001, terjadi peristiwa penembakan terhadap Kabila yang akhirnya merenggut nyawanya setelah ia sempat dirawat selama 2 hari. Berbagai dugaan & tuduhan lalu muncul ke permukaan mengenai siapa yang mendalangi pembunuhan Kabila. Posisi lowong Laurent-Desire Kabila kemudian digantikan oleh putranya, Joseph Kabila. Berbeda dengan ayahnya, Joseph Kabila cenderung lebih lunak & kooperatif dibanding ayahnya sehingga perundingan-perundingan yang selama ini menemui jalan buntu pun mulai menemukan titik terang. Di tahun ini, tim pengawas PBB juga melaporkan adanya aktivitas eksploitasi mineral secara ilegal oleh Rwanda, Uganda, & Zimbabwe di sejumlah wilayah RDK.

Tahun 2002, kondisi kubu anti-Kabila semakin melemah setelah sejumlah besar tentara Rwanda melakukan desersi atau membelot ke kubu pro-Kabila. Milisi-milisi dari etnis Banyamulenge yang selama ini menjadi milisi anti-Kabila yang paling dominan juga mulai menghentikan aktivitas perangnya karena lelah akan konflik yang tidak jelas kapan akan berakhirnya. Di lain pihak, kondisi RDK di bawah pemerintahan Joseph Kabila juga semakin mantap menyusul keberhasilannya menstabilkan kondisi wilayah RDK barat & keberadaan pasukan perdamaian internasional di sana sejak tahun 2001.

Setelah melalui perundingan damai yang alot & panjang, Joseph Kabila akhirnya setuju untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok pemberontak dalam pemerintahan (power-shared government) pada akhir tahun 2002 melalui apa yang dikenal sebagai Persetujuan Pretoria (Pretoria Accord). Hasil dari perundingan itu kemudian dilaksanakan pada bulan Juni 2003 melalui pembentukan pemerintahan transisi RDK di mana pemerintahan tersebut bertanggung jawab atas segala urusan nasional RDK hingga diadakan pemilu untuk mendapatkan pemimpin baru RDK. Pembentukan pemerintahan transisi tersebut lalu diikuti dengan penarikan mundur semua pasukan negara-negara Afrika yang terlibat perang, kecuali Rwanda. Sejak itu, bisa dikatakan Perang Kongo Kedua secara resmi sudah berakhir.

### **Peran Uni Afrika**

*Africa Union* atau Uni Afrika merupakan sebuah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1963. Dalam piagamnya dijelaskan bahwa perdamaian dan keamanan harus dibentuk dan dipelihara di wilayah Afrika. Pada awal tahun 1990 beberapa konflik baru muncul di Afrika.

Kegagalan masyarakat internasional untuk campur tangan terhadap masalah ini dan terutama kegagalan untuk mencegah genosida di Rwanda membuat keinginan untuk memperkuat organisasi kawasan Afrika sebagai wadah untuk mencari solusi bagi masalah-masalah terutama masalah konflik yang terjadi di Afrika.

Pada tahun 1999 di Sierte, Libya OAU berubah menjadi African Union atau Uni Afrika (UA). Selain untuk mengedepankan kerjasama dalam bidang keamanan, Uni Afrika pun mempunyai misi untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik dan juga keterbukaan dalam bidang politik (Nieuwkerk; 2004; 64).

Undang-Undang dari Uni Afrika kemudian ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2000 dengan peresmian organisasi yang terjadi pada bulan Juli 2002. Semua negara-negara Afrika menghadiri peresmian tersebut kecuali Maroko karena menentang keanggotaan dari Sahara Barat. Dengan kelahiran Uni Afrika ini diharapkan Uni Afrika dapat menjadi aktor perdamaian dan keamanan di wilayah Afrika. (Zartman; 2000; 77).

Sehingga dalam menanggapi konflik yang terjadi di Kongo, yang dalam perkembangannya terus menunjukkan keprihatinan yang luar biasa terutama dari negara-negara internasional, sehingga diperlukan upaya dari Uni Afrika dalam mengambil langkah yang tegas dan tepat sebagai satu-satunya organisasi regional di wilayah Afrika yang memiliki fungsi dan tujuan untuk menciptakan stabilitas perdamaian di negara-negara Afrika.

Tidak hanya itu masyarakat internasional juga mengancam keras konflik yang terjadi di Kongo, karena pada kenyataannya di lapangan yang menjadi korban adalah anak-anak balita dan juga kaum perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan juga seksual. Sehingga banyaknya terjadi berbagai macam pelanggaran HAM, berbagai macam bantuan juga disalurkan oleh masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga bantuan internasional untuk membantu korban dan juga para pengungsi seperti obat-obatan makanan dan juga air bersih.

Sebagai sebuah organisasi regional, tantangan yang dihadapi oleh Uni Afrika sangatlah berat, baik dari segi internal maupun eksternal kawasan tersebut. Bila dibandingkan sekilas dengan organisasi regional di kawasan Asia, misalnya, jelas sekali terlihat bahwa Uni Afrika masih belum dapat menunjukkan pengaruh atau eksistensinya di dunia internasional. Ada beberapa faktor terkait dengan perkembangan regionalisme di Afrika ini. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah kondisi geografi Afrika yang didominasi oleh wilayah gurun yang tandus,

teknologi dan sumber daya manusia yang kurang berpendidikan, dan banyaknya angka kriminalitas seperti pelanggaran HAM, terorisme dan masalah-masalah internal lainnya. Kondisi tersebut membuat negara-negara maju menjadi enggan untuk memulai penanaman modal atau investasi di Afrika. Hal ini tentu saja berpengaruh pada pertumbuhan negara Afrika sendiri yaitu dengan sedikitnya peran pihak asing (negara maju) di wilayah Afrika, maka globalisasi pun juga akan sulit untuk menjangkau negara tersebut (<http://www.ohchr.org>. 10 September 2011).

Kondisi geografi suatu negara memang tidak mungkin untuk diubah, tetapi faktor lain seperti seperti teknologi, sumber daya manusia, dan tingkat kriminalitas di wilayah Afrika merupakan variabel yang bisa diubah. Hal pertama yang harus diubah adalah mengenai sumber daya manusia Afrika yang kurang ahli. Organisasi-organisasi regional, misalnya Uni Afrika dan pemerintah seharusnya mengadakan suatu pelatihan bagi masyarakat Afrika sehingga tenaga kerja masyarakatnya dapat memaksimalkan usaha-usaha dalam negeri. Apabila sumber daya manusia di Afrika dapat ditingkatkan ke tingkat profesional, maka perekonomian Afrika akan dapat ditingkatkan juga. Kedua, masalah teknologi. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik, teknologi juga akan dapat ditingkatkan ke skala global. Ketiga, masalah kriminalitas yang sulit sekali diselesaikan. Jika masalah kriminalitas di Afrika dapat diminimalisasi, maka negara-negara maju mungkin tidak akan enggan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Afrika dan hal ini tentu saja akan dapat memajukan regionalisme di Afrika.

### **1. Proses Lahirnya *Pretoria Accord Agreement***

Ketika dirasa dialog antar *Congolese* (Bangsa Kongo) diprediksi akan mengalami kegagalan pada bulan April 2002, dan proses perdamaian mencapai kata sepakat diantara pihak-pihak yang bertikai, dimana di dalamnya terlihat perkembangan yang cukup signifikan bahwa proses perdamaian yang selama ini berjalan akan mengalami kegagalan. Mustapha Niasse, Seketaris Jenderal PBB yang memberikan mandat kepada Republik Demokratik Kongo untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi selama enam bulan, yang kemudian diperpanjang sampai dengan Maret 2003, untuk turut serta dalam segala bentuk perjanjian yang selama ini dianggap masih kurang berpartisipasi serta serius dalam menyelesaikan konflik internal yang tengah terjadi. (Rogier; 2006 : 108).

Dari bulan juni 2002 hingga bulan Oktober 2002, Sekjen PBB Mustapha Niasse menyelesaikan tiga misi di kawasan Afrika khususnya Republik Demokratik Kongo, untuk memilih dengan siapa ia akan berdiskusi terhadap para partai yang peduli untuk mengintegrasikan kekuatannya selama masa transisi. PBB menjadi fasilitator dan mendapatkan dukungan dari tim mediasi Afrika Selatan, yang dipimpin oleh Menteri Provinsi dan Pemerintahan Lokal yakni Sidney Mufamadi, walaupun Presiden Mbeki's tidak sukses dalam melakukan campur tangannya di *Sun City* yang membuat Afrika Selatan kesulitan untuk memainkan peranan penting, karena Pretoria mencakup komitmen yang serius terhadap proses perdamaian di Republik Demokratik Kongo. (Rusamira; 2002; 44).

Pada bulan Juli 2002 Perjanjian Pretoria atau yang lebih dikenal dengan Pretoria I antara Republik Democratic Kongo dan Rwanda telah disepakati. Hal ini termasuk komitmen yang dikeluarkan oleh Rwanda untuk menarik semua pasukan tentaranya dari Republik Demokratik Kongo, sementara Pemerintahan Republik Kongo harus memastikan pembubaran dari mantan anggota FAR dan beberapa kelompok kekuatan oposisi di Republik Demokratik Kongo. PBB dan Afrika Selatan dilibatkan dalam berbagai tugas verifikasi. Hal tersebut termasuk menstabilkan pihak ketiga dalam memverifikasi mekanisme dan penciptaan dari sekretariat partai pihak ketiga dalam memverifikasi mekanisme di Kinshasa, dimana hal ini tertuang di dalam implementasi dari berbagai macam komitmen yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai. (Annan; 2004).

Di dalam waktu proses pembuatan perjanjian Pretoria I yang diselesaikan pada tanggal 30 Juli 2002 dengan ditandai dengan penarikan mundur pasukan tentara Rwanda dari wilayah Republik Demokratik kongo dan pelucutan dari mantan anggota FAR dan kelompok oposisi lain, dan ditandatangani oleh Presiden Afrika Selatan dan juga Sekjen PBB sebagai saksi, akan tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap perjanjian pada waktu tiga tahun ke depan selama proses Lusaka. Presiden Rwanda, Paul Kagame menarik mundur pasukannya tanpa menunggu protes dari Joseph Kabila, dimana ketika itu tumbuh suatu persepsi dimana Rwanda menjadi penyebab dari gagalnya negosiasi *Sun City*. Penyelesaian daripada perjanjian Pretoria dan juga Luanda terbilang telah mencapai kesepakatan final untuk dinegosiasikan demi terwujudnya suatu perdamaian (Houston; 2006; 65).

Dapat dilihat di atas bahwa proses perjanjian lahirnya *Pretoria Accord Agreement* juga melibatkan beberapa pihak internasional baik organisasi maupun aktor negara yakni PBB dan juga Afrika Selatan, sebagai mediator dalam

menyelesaikan permasalahan inti yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dengan mendorong Rwanda untuk menarik mundur pasukan tentaranya dari wilayah negara itu.

Selanjutnya dalam perjanjian berikutnya, yakni terkait dengan *Pretoria Accord Agreement II*, bahwa proses perdamaian selanjutnya sebagaimana yang diaplikasikan dalam perjanjian sebelumnya yakni *Pretoria Accord Agreement I* bahwa peraturan-peraturan yang telah dibuat dengan prinsip-prinsip selama masa konsensus pada Oktober 2002 antara Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan MLC.

Perdana menteri Lokal Afrika Selatan, Sydney Mufamadi, telah memediasi kesepakatan damai di Pretoria dalam detik-detik kekecewaan untuk tidak mengulangi kegagalan ICD di *Sun City*. Presiden Kabila dan Museveni keduanya telah mengikuti proses perundingan perdamaian yang dilakukan serta dengan mengumumkan pemikiran mereka terhadap diluncurkannya *Ituri Pacification Commission* (IPC). Rwanda menarik dua batalion tentaranya dari Republik Demokratik Kongo, dan pada tanggal 17 Desember 2002 partai yang berkuasa menandatangani perjanjian damai telah menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun yang diwarnai oleh banyaknya perang sipil dan saudara. (Boshof; 2003; 12).

Pada tanggal 17 Desember 2002 di Pretoria, Partai utama Republic Demokratik Kongo yang terlibat dalam konflik, termasuk pemerintah Republik Demokratik Kongo, RCD-Goma, MLC, RCD-ML, RCD-N dan Mai-Mai, akhirnya menandatangani perjanjian global pada masa transisi pemerintahan di Republik Demokratik Kongo yang dikenal dengan sebutan *Pretoria Accord Agreement II*. Terlepas dari penyebab umum konflik yang terjadi bahwasanya perjanjian ini merupakan suatu cerminan dari prinsip-prinsip perang yang terjadi antar negara bagaimana mereka membagi kekuatan pada level pemerintahan, selama masa periode transisi (Dzimba; 2001; 34).

Presiden Kabila mengingatkan Kepada kepala pemerintahan dan juga komandan dari Angkatan Bersenjata Kongo, tapi akan dilaksanakan oleh empat wakil presiden yang berkuasa atas komisi pemerintahan, yang akan membagi kepada beberapa menteri dan deputi menteri. Dengan jumlah total pemerintahan transisi yang termasuk juga dengan tidak kurang dari 36 menteri dan 25 deputi menteri.

Mengikuti perkembangan dari penandatanganan perjanjian Global pada masa Transisi di Republik Demokratik Kongo pada tanggal 17 Desember 2002, dialog khusus bagi Kongo, Moustaphe Niasse melanjutkan bahwa selama masa

dialog tidak akan ada waktu penundaan hingga kesepakatan final dalam dialog tercapai. Mengacu kepada peluncuran Komisi Ituri Pacification yang dikeluarkan oleh *Luanda Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 6 September 2002 gagal dalam mencapai hasil kesepakatan pada awal tahun 2003.

Pentingnya peraturan MONUC di kawasan regional Afrika dilandaskan kepada pengadaptasian Resolusi Dewan Keamanan 1493 pada 28 Juli 2003, dengan mandat MONUC yang diperpanjang hingga 30 Juli 2004. (Rogler; 2003; 66). Walaupun perjanjian Pretoria tersebut merupakan suatu langkah kemajuan yang cukup besar dalam penyelesaian dari proses perdamaian di Republik Demokratik Kongo, *Pretoria Accord Agreement II* tidak diciptakan dari kebijakan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya. *Pretoria Accord Agreement* berisi antara lain (ICG; 2003; 13):

- Penarikan mundur tentara Rwanda yang berada di wilayah Republik Democratic Kongo
- Pemerintah Kongo hanya bertanggung jawab atas pencarian kelompok bersenjata suku hutu (Rwanda) yang berada di wilayah Kongo
- Pemerintah Kongo akan menghentikan semua dukungan dan bantuannya terhadap kelompok pemberontak suku Hutu.
- Afrika Selatan diijinkan untuk hadir di wilayah Kongo sebagai pihak ketiga yang melakukan control agar perjanjian ini dapat berjalan.

## **2. Perkembangan dan Dampak Perjanjian Pretoria Terhadap Konflik di Kongo**

Konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo merupakan perang saudara berlangsung berkepanjangan di Kongo sejak 1998 yang menghancurkan serta menyeret seluruh wilayah tersebut dan negara-negara di sekitarnya. Aksi kekerasan tersebut telah menghancurkan infrastruktur dan perekonomian negara tersebut hingga akhirnya PBB mengambil alih permasalahan di negara itu dan memaksa Presiden Joseph Kabila menyelenggarakan Pemilihan Umum pada 30 Juli 2006.

Kepala negara Joseph Kabila, disebut-sebut merupakan calon terkuat dan sejumlah *polling* awal menyatakan Kabila akan menang dalam babak pertama pemilihan presiden. Kabila diperkirakan bisa mengalahkan 33 calon Presiden lain

termasuk mantan pemimpin pemberontak Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba adalah mantan pemberontak yang menjadi menteri keuangan dan dituduh melakukan kejahatan. Bemba telah melancarkan perang sengit tujuh tahun sejak 1998. Pada puncaknya, konflik di bekas negara Zaire itu, telah menyeret setidaknya tujuh kekuatan militer asing dan, meskipun ada serangkaian kesepakatan perdamaian dan proses peralihan berjalan sejak 2003, pergolakan etnik dan penjarahan terus mewabah bagian timur negeri tersebut. Calon lain meliputi keturunan tokoh kenamaan di negara bekas koloni Belgia itu, termasuk putra diktator lama Mobutu Sese Seko dan pahlawan kemerdekaan yang terbunuh Patrice Lumumba. Lumumba menang dalam pemilihan demokratis terakhir di negeri tersebut pada malam menjelang kemerdekaan 1960, tapi kemudian ia digantikan oleh Mobutu yang membuat negara itu identik dengan korupsi dan salah dalam mengurus pemerintahan sehingga dia diturunkan dari jabatannya pada tahun 1997.

Selain konflik politik, juga terjadi pergolakan etnik antara lain konflik Ituri yaitu konflik antara agrikulturalis Lendu dan peternak Hema di wilayah Ituri sebelah timur laut Republik Demokratik Kongo. Pertempuran bersenjata dimulai tahun 1996 dan masih berlanjut sampai sekarang yang kemudian menyulut terjadinya konflik kivu. Konflik kivu adalah konflik bersenjata antara militer Republik Demokratik Kongo melawan pasukan pemberontak dibawah komando Laurent Nkunda. Konflik ini juga melibatkan *United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo*.

Konflik-konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk, termasuk akses kesehatan, makanan, tempat tinggal sehingga menyebabkan ketakutan. Ketakutan tersebut menyebabkan warga negara pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan. Dikarenakan alasan untuk mencari perlindungan, terjadilah perpindahan penduduk secara besar-besaran yang melintasi wilayah batas negara dan mereka disebut dengan pengungsi.

Konflik-konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo menyebabkan jumlah pengungsi yang selalu bertambah. Pada bulan November tahun 2004 lebih dari 1500.000 pengungsi, pada tahun 2008 jumlah pengungsi bertambah menjadi 200.000 pengungsi. Kondisi para pengungsi pun sangat memprihatinkan. Mereka memadati kamp-kamp pengungsian seperti kamp pengungsian di Kibati yang berada di sekitar kota Goma, ibu kota Provinsi Kivu Utara. Lebih dari 1.000.000 orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik tidak terjangkau bantuan. Mereka terjebak dalam pertempuran, bersembunyi, atau terisolasi di daerah yang

dikuasai pemberontak. Pada tanggal 23 Januari 2008, sekitar 150.000 warga meninggalkan rumahnya akibat kekerasan yang terus berlanjut, termasuk aksi perkosaan. Bahkan lebih dari 2.000 perkosaan tercatat terjadi pada Juni 2008 hanya di propinsi Kivu Utara. Sebagian besar wanita dan anak perempuan korban pemerkosaan tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Para pengungsi mengalami kelaparan dan menderita berbagai macam penyakit seperti malaria, diare, pneumonia, dan gizi buruk sehingga sekitar 5.400.000 orang tewas. Para pengungsi hanya bisa menggantungkan hidup dari bantuan kemanusiaan. Warga pun harus mengantre untuk mendapatkan bantuan berupa bahan-bahan pokok serta obat-obatan (Kompas, 30 Juli 2008).

Saat konflik berlanjut pada tanggal 13 November 2008 jumlah pengungsi bertambah 250.000 orang, pada tanggal 31 oktober 2008 kelompok separatis mendekati kamp pengungsi yang menyebabkan 50.000 pengungsi melarikan diri dari kamp pengungsian di beberapa wilayah seperti di kota Rutshuru, di Timur Kongo ([www.korantempo.com](http://www.korantempo.com), 3 Desember 2008).

Dapat disimpulkan dari gambaran diatas, bahwa lahirnya perjanjian Pretoria I dan II walaupun masih banyak terjadinya konflik internal akan tetapi hal ini secara langsung memberikan dampak yang cukup baik bagi Republik Demokratik Kongo sendiri, dengan ditariknya beberapa pasukan tentara dari negara lain, dalam hal ini adalah Rwanda, sehingga masa transisi pemerintahan pun dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Pemilu untuk menentukan pemimpin baru RDK secara demokratis akhirnya dilaksanakan pada bulan Juni 2006 di mana Joseph Kabila keluar sebagai pemenang, namun kerusuhan timbul tak lama kemudian setelah munculnya isu bahwa Kabila melakukan kecurangan. Pemilu ulang pun kembali dilaksanakan di bulan Oktober 2006 di mana Kabila kembali keluar sebagai pemenang, namun kali ini dengan perolehan suara yang lebih besar. Kendati hasil pemilu tersebut masih menuai rasa tidak puas dari pihak oposisi, Joseph Kabila pada akhirnya resmi diangkat sebagai presiden RDK terhitung sejak akhir 2006. Diangkatnya Kabila sebagai presiden RDK pun mengakhiri aktivitas pemerintahan transisi yang terbentuk sejak tahun 2003. Kendati Perang Kongo Kedua sudah resmi berakhir sejak tahun 2003, konflik di RDK belum benar-benar usai hingga sekarang. Masih rapuhnya pemerintahan baru RDK & ketergantungan mereka akan keberadaan pasukan asing menjadi penyebab utama kenapa konflik lokal tersebut masih belum selesai hingga sekarang. Beberapa contoh konflik utama yang masih terjadi di RDK hingga sekarang adalah konflik di wilayah RDK timur. Selain itu, pasukan

Rwanda juga masih enggan menarik pasukannya dari wilayah RDK sebelum mereka mendapat jaminan bahwa milisi-milisi Hutu yang bersembunyi di RDK tidak akan mengganggu perbatasan mereka lagi.

Perang Kongo Kedua juga membawa dampak serius bagi kerusakan lingkungan setempat, terutama bagi kehidupan satwa-satwa ekstotis Afrika di kawasan RDK. Sebabnya tidak lain karena selama konflik, para prajurit yang terlibat dalam perang sengaja memburu satwa-satwa di kawasan tersebut, entah untuk diambil dagingnya atau untuk dijual lagi. Hal tersebut juga diperparah oleh aktivitas pembabatan hutan & perburuan liar yang masih sering terjadi. Dikhawatirkan bila tidak ada tindakan antisipasi dari pemerintah setempat, fauna-fauna penting seperti gorila & gajah Afrika yang ada di sana akan punah dalam waktu singkat.

Dampak negatif dari Perang Kongo Kedua yang paling terasa adalah timbulnya korban jiwa di mana selama periode perang, jumlah korban tewas mencapai 3 juta lebih & 2 juta lainnya yang masih hidup mengungsi keluar RDK. Jumlah korban tewas juga belum sampai di situ karena hancurnya fasilitas-fasilitas penting akibat perang menyebabkan sekitar 45.000 rakyat RDK meninggal setiap bulannya hingga sekarang akibat penyakit atau kelaparan. Karena besarnya jumlah korban & dampak negatif jangka panjang yang ditimbulkan, Perang Kongo Kedua kerap disebut-sebut sebagai tragedi kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia II.

### **3. Keterlibatan Uni Afrika dalam Perjanjian Pretoria**

Uni Afrika merupakan salah satu organisasi regional yang paling bertanggung jawab dan memegang tugas yang cukup berat dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di regionalnya. Dimana peran serta Uni Afrika adalah dalam mengerahkan pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya berasal dari negara-negara di kawasan Regional Afrika dalam menjaga situasi atas proses perundingan damai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai agar terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam melaksanakan proses perundingan tersebut (Nieuwkerk; 2004; 55).

Uni Afrika juga berperan dalam menciptakan perjanjian Lusaka, yakni sebuah perjanjian gencatan senjata antara Rwanda dan RDK dalam JMC (*Joint Military Committe*) untuk memastikan tidak adanya kontak senjata antara pihak-pihak yang bertikai. Pada tahun 2002 dalam mengupayakan proses perundingan damai dalam perjanjian Pretoria dimana Uni Afrika berhasil melaksanakan mekanisme dalam penyelesaian konflik yakni dengan keberhasilan menenangkan

kedua pihak agar mau melakukan gencatan senjata, yang akhirnya memulai suatu proses perundingan damai.

Konflik yang terjadi di Kongo atau lebih tepatnya yang penulis ambil yaitu perang Kongo II, juga diintervensi oleh beberapa pihak dalam penyelesaiannya dan tidak hanya Uni Afrika. Negara tetangga yang juga berperan besar dalam lahirnya perjanjian Pretoria yaitu Afrika Selatan melalui Menteri Dalam Negerinya yaitu Sydney Mufamadi, yang membantu melakukan mediasi dalam persetujuan perdamaian di Pretoria, dimana sebelumnya setelah tahun 1999 hal tersebut dilakukan oleh Presiden Kabila dan Museveni dalam konflik regional antara Uganda, Rwanda serta pemerintah Kinshasha.

Ketidaksanggupan pemerintah Kongo yang sedang mengalami transisi pemerintahan pada akhirnya memaksa pihak-pihak diluar negara ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi di Kongo. Uni Afrika lah salah satu organisasi regional yang dianggap paling netral dalam menyelesaikan konflik tersebut, disamping Uni Afrika sebagai salah satu organisasi regional di benua tersebut yang dianggap mampu menyelesaikan masalah di kawasannya.

Dalam penyelesaian konflik di Kongo atau pada perang Kongo II, Uni Afrika berperan besar dalam mempertemukan kedua belah pihak yakni dari pihak Rwanda dan juga pihak Kongo serta pihak-pihak oposisi yang selama ini terkenal sebagai gerakan pemberontak di wilayah perbatasan antara Kongo dan Rwanda, serta melibatkan negara Afrika lain seperti Afrika selatan sebagai negara yang cukup disegani di wilayah Afrika oleh negara-negara lainnya di benua tersebut.

Dimana perjanjian Pretoria tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2003, yang juga akan membantu pemerintah Kongo untuk dapat membangun transisi pemerintahan agar dapat membangun negara Kongo yang lebih baik lagi sehingga diharapkan delegasi yang hadir dan menandatangani perjanjian pretoria tersebut dapat membantu Kongo untuk bangkit menjadi sebuah negara yang lahir dengan pemerintahan yang solid dan kuat serta untuk meminimalisir konflik yang dapat terjadi khususnya kepada pihak-pihak yang telah mewarnai sejarah perjalanan Kongo dalam isu-isu keamanan.

## **Simpulan**

Setelah negara-negara di Afrika lepas dari jajahan negara-negara Eropa, negara-negara di Afrika jatuh kepada para pemimpin yang diktator. Konflik di

negara-negara Afrika pun sulit untuk dicarikan solusi menuju kepada suatu perdamaian. Negara-negara di Afrika yang kental dengan konflik yaitu antara lain Rwanda, Kongo, Nigeria, Sudan, Kenya, dan juga Somalia yang sudah menelan korban jiwa yang cukup mengesankan.

Kongo merupakan salah satu negara di wilayah Afrika yang memiliki intensitas konflik internal yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan beberapa isu yang mengancam keselamatan warganya, seperti isu kemiskinan, wabah penyakit, sehingga pada akhirnya membagi-bagi beberapa masyarakat menjadi beberapa kelompok yang akhirnya menimbulkan persaingan dalam visi dan misi, dan tidak terlepas juga dari beberapa suku bangsa dan ras, karena sebagian besar masyarakat di wilayah Afrika belum terbiasa untuk menerima perbedaan. Terpecahnya beberapa kelompok masyarakat yang kemudian menjadi gerakan pemberontak yang pada akhirnya melibatkan tentara dari negara-negara asing untuk terlibat di dalam perang Kongo II, yang disinyalir merupakan perang terbesar di benua Afrika.

Sebagai satu-satunya organisasi regional di kawasan Afrika, *African Union* atau yang lebih dikenal dengan Uni Afrika, tidak bisa tinggal diam menyaksikan salah satu negara anggotanya dilanda konflik internal yang mendapatkan respon dan reaksi yang luar biasa dari negara-negara internasional, dimana hal ini merupakan tugas utama dari Uni Afrika berdasarkan tujuan dari organisasi regional itu dibentuk yakni untuk memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

Hingga pada akhirnya Uni Afrika mengajak pihak-pihak yang bertikai melalui suatu proses perundingan damai melalui perjanjian yang dikenal sebagai *Pretoria Accord Agreement* dimana dalam perjanjian tersebut pihak yang bertikai yakni Kongo dan Rwanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan menarik semua pasukannya keluar dari wilayah tersebut.

Hal ini dilakukan mengingat kondisi dan situasi masyarakat Kongo yang semakin hari semakin memprihatinkan sehingga dibutuhkan penyelesaian secara cepat untuk kembali membangun infrastrukturnya melalui pembentukan pemerintah baru yang dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Kongo itu sendiri. Hingga akhirnya pasca perjanjian yang telah disepakati oleh Kongo dan Rwanda pada *Pretoria Accord Agreement* 2002, perang Kongo II resmi berakhir, kini tugas Uni Afrika adalah membenahi dan memfasilitasi proses pembangunan pemerintahan dan mengusung integrasi di wilayah Kongo, karena masih banyak terdapatnya kelompok-kelompok

masyarakat yang menjadi gerakan separatis dan ingin memerdekakan diri dari pemerintahan resmi Kongo, karena dianggap tidak berhasil membawa negara tersebut keluar dari kesulitannya.

Seharusnya Uni Afrika lebih mendorong negara-negara Afrika disekitarnya untuk membantu proses pemulihan pasca konflik internal yang terjadi, sehingga tidak perlu adanya lagi campur tangan pihak luar seperti PBB ataupun negara yang berada di luar benua Afrika. Sehingga proses pemulihannya akan lebih cepat, dan tingkat kepercayaan masyarakat Kongo akan bisa pulih lebih baik lagi.

Peran Uni Afrika sendiri terhadap lahirnya Perjanjian Pretoria cukup signifikan, karena Uni Afrika secara langsung melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bertikai dalam hal ini adalah Rwanda dan Republik Demokratik Kongo agar kedua belah negara ini segera memikirkan proses perundingan damai, mengingat bahwa untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional Afrika itu sendiri serta membantu Republik Demokratik Kongo untuk bangkit karena sedang mengalami transisi pemerintahan akibat konflik internal dan eksternal yang berkepanjangan.

Walaupun di deskripsi diatas dijelaskan bahwa dalam pengupayaan perjanjian pretoria I dan II melalui mediasi PBB dan juga Afrika Selatan, akan tetapi uni Afrika memegang peranan yang penting dalam terciptanya perjanjian tersebut, disebabkan oleh kepentingan dalam mengintegrasikan regional Afrika dalam upaya menyatukan negara-negara Afrika dalam satu regional dalam juga bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keamanan serta mendukung terjadinya perdamaian di dunia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Van Nieuwkerk, 2004. *The Role of The AU and NEPAD in Africa's New Security Regime in Peace in Africa: Towards a Collaboratives Security Regime*, Edited By. S Field. Johannesburg : Institute for Global Dialogue.

- Chesterman, Simon. 2001. *Just War or Just Peace? : Humanitarian Intervention and International Law*, New York: Oxford University Press.
- Cliffers, Jackie, 2001, *Peacekeeping in the DRC. MONUC and the Road to Peace*. Pretoria: South African Institute for Security Studies.
- Dzimba, John, 2001."A Common Subregional Agenda For Peace, Human Security and Conflict Prevention : A View from SADC in Peace, Human Security and Conflict Prevention in Africa-Proceedings of The UNESCO-ISS Expert Meeting Held in Pretoria, South Africa, 23-24 July 2001, Edited By Moufida Goucha and Jakkie Cilliers. Pretoria : Institute Security Studies.
- Houston, Andrew, 2006;"Why Do They Do It Like This? An Analysis of The Factors Influencing Mediation Behaviour in International Conflicts in Conflict Resolution, Volume III. Edited By Daniel Druckman & Paul F. Diehl London : Sage Publications.
- Kartasasmita, Koesnadi, 1998. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: PT. Angkasa.
- Perwita, Banyu, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prendergast, John,2006 "Democratic Republic of the Congo", in Durch, William (ed.). *Twenty-first Century Peace Operations*. Washington, DC: United Institute of Peace.
- Reed. 2004."Public Policy, Contested Government, and State Decay: Zaire as a regional Actor in The Great Lakes Crisis in War and Peace in Zaire/Congo-Analyzing and Evaluating Intervention, 1996-1997. Edited by H. Adelman & G.C Rao. Africa world Press, Inc.
- Reilly, Ben, 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar : Sejumlah Pilihan untuk negosiator*. Jakarta: AMMEPRO.
- Rogler, Edward, 2003. *The Inter-Congolese Dialogue : A Critical Overview in Challenges of Peace Implementation : The UN Mission in The Democratic Republic of Congo Edited By M Malan & J Gomes Porto*, Pretoria : ISS.

- Rudy, Teuku May, 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Eresco.
- Soeprapto. 1997. *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Swart, George, 2004; “*Conflict in Democratic Republic Congo : A Critical Assessment of The Lusaka Ceasefire Agreement*”; SAIIA Report, Number 40. Johannesburg: The South African Institute of International Affairs.
- Zartman, LW.2000.”*Ripeness : The Hurting Stalemate and Beyond*”; In Stern, P and Druckman.D. Eds. :*International Conflict Resolution after Coldwar*”; Washington National Academy Press.

### **Jurnal dan Dokumen**

- Kevin Annan, 2004.”*Sixteenth Report of The Secretary General on the United Nations Organisations Mission in The Democratic Republic of Congo*, UN Security Council, 25 Maret 2004.
- Eric Rusamira. 2002. “*The Problems of The Disarmament of The Negative forces in the Democratic Republic of Congo : A Critical Analysis of Possible options in Strategic Review Southern Africa*, Volume XXIV, Number 2. Pretoria : Institute for Strategic Studies University of Pretoria.
- African Union. Vision & Mission of the African Union.*
- Hendry Boshoff. 2003. “Delegates, dialogues and desperadoes : The ICD and The DRC Peace Process in African Security Review, Volume 12, Number 3, 2003.
- “Rwanda Hutu Rebels in the Congo : a new Approach to Disarmament and Reintegration ICG Africa Report No. 63, 23 May 2003.
- Hannah Taylor. ”MONUC and SSR in the Democratic Republic of Congo”, in *International Peacekeeping*, Vol. 15, No. 4 (August 2008).
- International Crisis Group. ”The Agreement on a Ceasefire in the Democratic Republic of Congo. An Analysis of the Agreement and Prospects for Peace”, ICG DRC Report No. 5 (August 20, 1999).

**Surat Kabar**

“Gambaran Pengungsi Kongo”; dalam Surat Kabar Harian Kompas, 30 Juli 2008

**Website**

[www.bbc.uk](http://www.bbc.uk) :”UNMDRC terlibat konflik”.

<http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm>

<http://www.newrwanda.org/index.php?midDRC.html>

*www.korantempo.com*, 50.000 pengungsi melarikan diri, edisi 3 Desember 2008,  
09:48 WIB

[http://pdfcontact.com/ebook/konvensi\\_jenewa.html](http://pdfcontact.com/ebook/konvensi_jenewa.html)

<http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract.html>

Robert S, “*International Conflict “Peace Studies and How to make A Deal”*”;  
diakses dari [www.peace&war.com](http://www.peace&war.com)

*United Nations General Assembly. “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,” Resolution 1514 of December 14, 1960.* diakses dari <http://www.ohchr.org>. tgl akses 10 September 2011,  
[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) ; “African Union.”